



Fenomena Rush terhadap Perbankan pada Masa Krisis Moneter di Indonesia, 1997-1998

Siti Solihah,^{1*} Djono¹

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: sitisolihah@student.uns.ac.id, djono@staff.uns.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 07-04-2026, Revised: 29-04-2026, Accepted: 02-05-2026, Published: 31-05-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya rush, proses fenomena rush, serta kebijakan pemerintah Indonesia terhadap rush tahun 1997-1998. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode historis yang memiliki empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa arsip koran seperti Analisa, Bali Post, Berita Yudha dan dokumen resmi serta sumber sekunder yang berupa jurnal, buku dan laporan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis sejarah dengan pendekatan sosial ekonomi Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang luar negeri Indonesia khususnya sektor swasta yang terus membengkak dan diperparah dengan adanya penularan karena krisis Baht di Thailand menjadi penyebab terjadinya rush. Pemberitaan mengenai jatuh tempo utang swasta Indonesia tahun 1998 menyebabkan kepanikan masyarakat. Melihat situasi perekonomian Indonesia yang terus bergejolak, pemerintah kemudian meminta bantuan kepada IMF. Salah satu program IMF yaitu penutupan 16 bank, tetapi kebijakan tersebut justru mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga terjadi penarikan dana secara besar-besaran pada bank yang tidak mengalami likuidasi seperti Bank Danamon, BCA, Bank Bali dan Bank Lippo. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi rush yaitu menegatkan likuiditas dengan menaikkan suku bunga, memberi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), serta memberikan jaminan kepada nasabah atau disebut Blanket Guarantee.

Kata Kunci:

kepercayaan masyarakat; perbankan; rush

Abstract

This study aims to determine the background of the rush, the process of the rush phenomenon, and the Indonesian government's policy regarding the rush in 1997-1998. The research method used is the historical method with four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. This study uses primary sources in the form of newspaper archives such as Analisa, Bali Post, Berita Yudha and official documents as well as secondary sources in the form of journals, books, and research reports. Data collection techniques used are document study and literature study. The data analysis technique used is historical analysis with a socio-economic approach. The results of the study indicate that Indonesia's foreign debt, especially the private sector, which continues to swell and is exacerbated by the contagion of the Baht crisis in Thailand, is the cause of the rush. News about the maturity of Indonesia's private debt in 1998 caused public panic. Seeing the continuing turbulent situation of the Indonesian economy, the government then requested assistance from the IMF. One of the IMF programs was the closure of 16 banks, but this policy actually resulted

in a decline in public confidence in banking, resulting in massive withdrawals of funds from banks that were not liquidated, such as Bank Danamon, BCA, Bank Bali, and Bank Lippo. The government's policy to overcome the rush is to tighten liquidity by raising interest rates, providing Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI), and providing guarantees to customers, also known as Blanket Guarantees.

Keywords:

banking; public trust; rush



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Negara Indonesia dijuluki sebagai “calon Macan Asia” sebelum terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998 oleh Bank Dunia. Julukan tersebut sudah terlebih dahulu disematkan pada negara China Taipei, Singapura, Korea Selatan dan Hongkong. Alasan pemberian julukan tersebut karena saat awal era Orde Baru, Indonesia sukses merealisasikan pembangunan ekonomi serta berusaha menurunkan angka kemiskinan. Sekitar dasawarsa tahun 1970-an-pertengahan 1990-an, negara Asia khususnya Indonesia dan Thailand dalam bidang perekonomian memiliki prestasi yang baik sehingga investor asing banyak yang tertarik untuk menanamkan modal di negara Indonesia dan Thailand (Tambunan, 2011).

Indonesia pada tahun 1988 tepatnya tanggal 27 Oktober 1988 mengeluarkan kebijakan di mana salah satu isinya mengenai pengumpulan dana dengan cara membebaskan pendirian bank baru dan pembukaan kantor cabang bank (Putra, 1993). Namun, siapa sangka kebijakan deregulasi Oktober 1988 tersebut menjadi puncak dari liberalisasi dalam bidang perbankan (Na'im, 2001). Liberalisasi tersebut menimbulkan persaingan antar bank swasta dalam mengumpulkan dana baik di dalam negeri maupun luar negeri (Nugroho, 2000). Dalam konteks tersebut, penambahan jumlah bank tidak disertai dengan adanya likuiditas rupiah yang memadai. Kondisi ini menyebabkan tingkat suku bunga antar bank melonjak dan sempat mencapai 28% pada Oktober 1988. Akibat suku bunga pinjaman dalam negeri tinggi maka menyebabkan peningkatan pinjaman ke luar negeri sehingga utang luar negeri Indonesia semakin banyak (Pangestu & Oscarita M, 1989).

Merosotnya nilai tukar rupiah dikarenakan selama Orde Baru banyak bank di Indonesia berutang kepada bank-bank luar negeri dengan jangka waktu yang pendek. Utang tersebut dimanfaatkan untuk modal kredit bagi perusahaan dalam negeri dalam bentuk rupiah. Utang luar negeri swasta bersifat jangka pendek tersebut digunakan untuk membiayai proyek jangka panjang seperti perumahan di mana modal yang dapat kembali dari proyek tersebut membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Ketika pinjaman tersebut sudah jatuh tempo pada tahun 1998-1999, tetapi para debitur tidak dapat melunasinya. Dana bank-bank tersebut akhirnya belum dikembalikan oleh para debitur. Kerugian juga dialami oleh bank karena terdapat perbedaan dengan nilai kurs sebelum depresiasi dan setelah depresiasi. Merosotnya nilai rupiah tersebut juga menyebabkan pembayaran pinjaman dalam rupiah menjadi mahal (Tambunan, 2011).

Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono, menyatakan bahwa utang swasta Indonesia yang jatuh tempo pada Maret 1998 sebesar 9,6 miliar dollar. Gubernur BI mengungkapkan bahwa total utang luar negeri swasta didasarkan pada

laporan bank kreditur, laporan debitur, survei di bank dan sumber data lainnya (Analisa, 1997i). Sementara itu, total utang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo pada bulan Juni 1998 sebesar 34,661 Miliar US\$ (Bank for International Settlements, 1998). Sebagian besar utang swasta Indonesia tidak dilindungi dengan hedging. Pendapatan perusahaan dalam bentuk rupiah, tetapi pinjamannya berbentuk dolar. Perusahaan-pun terlalu santai sehingga tidak mempersiapkan diri bahwa sewaktu-waktu kurs rupiah dapat anjlok sehingga dolar menjadi naik dan langka (Boediono, 2016).

Permasalahan mengenai utang swasta belum terdapat solusi sehingga menyebabkan para pelaku pasar khawatir dan kebingungan mengenai kesanggupan perusahaan swasta untuk membayar kembali utang tersebut. Kebingungan tersebut akhirnya mengakibatkan penarikan rupiah kemudian banyak yang membeli dolar salah satunya investor yang mengakibatkan rupiah semakin tertekan (Darmawan, 1998). Fenomena Rush yang terjadi tersebut memiliki akar penyebab yaitu menumpuknya utang perbankan. Kemudahan dalam mendirikan bank pada tahun 1988 tanpa pengawasan yang ketat memberikan kontribusi yang besar dalam penumpukan utang Indonesia (Abdulgani, 1998).

Segala upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia untuk menangani kemerosotan nilai rupiah, tetapi akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1997, Indonesia mengambang secara bebas rupiah. Setelah rupiah diambangkan, Pemerintah Indonesia terus membuat serta menerapkan kebijakan untuk menanggulangi guncangan ekonomi. Akan tetapi, keadaan ekonomi semakin memburuk sehingga Pemerintah Indonesia memutuskan untuk meminta bantuan kepada IMF atau International Money Fund. Kemudian, IMF mulai memberikan program kepada Indonesia tanggal 1 November 1997, salah satu programnya yakni penutupan 16 bank yang sakit. Penutupan bank tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun sehingga masyarakat melakukan penarikan secara besar-besaran tabungannya (rush) bahkan masyarakat juga menarik tabungan pada bank yang tidak ditutup seperti yang terjadi pada Bank Arya dan Bank Lippo yang merupakan bank swasta yang berada di Pematang Siantar (Analisa, 1997d) serta Bank BCA (Analisa, 1997g).

Penelitian mengenai rush ini sebelumnya telah dilakukan oleh Diamond & Dybvig (1983) yang menjelaskan bahwa rush dapat mengakibatkan bank yang awalnya "sehat" menjadi "sakit" bahkan mengalami kebangkrutan. Jadi, model yang dikembangkan oleh Diamond & Dybvig untuk menangani rush adalah penundaan konvertibilitas dan menyediakan asuransi pinjaman. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sharma (2001) yang membahas mengenai krisis perbankan di Indonesia yang meluas. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fane & McLeod (1999) yang membahas mengenai kesalahan dalam kebijakan moneter serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi kelemahan sistem keuangan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Dijk (2017) yang membahas mengenai faktor psikologis dalam fenomena rush di mana seseorang yang memiliki emosi yang tidak stabil ketika dihadapkan dengan berita negatif maka cenderung akan melakukan penarikan dana dibandingkan dengan seseorang yang memiliki emosi yang stabil. Penelitian yang dilakukan oleh Kasri et al (2017) membahas mengenai rush yang dihubungkan dengan stabilitas perbankan syariah di mana faktor psikologis dan fundamental memicu tingkah laku nasabah pada perbankan syariah untuk menarik dananya.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagian besar berfokus terhadap kajian teoritis dari fenomena *rush* serta kajian mengenai krisis perbankan secara umum di Indonesia. Penelitian yang berfokus terhadap proses fenomena *rush* pada perbankan di Indonesia khususnya tahun 1997-1998 masih terbatas. Sementara itu, fenomena *rush* yang terjadi tahun 1997-1998 memiliki dampak yang signifikan bagi perbankan dan kondisi perekonomian Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kebaruan dalam penelitian ini terdapat pada fokus kajian yang secara spesifik membahas mengenai proses terjadinya fenomena *rush* pada perbankan di Indonesia tahun 1997-1998.

Penelitian ini menggunakan perspektif teori *rush* dan kepercayaan masyarakat untuk menjelaskan peristiwa penarikan dana secara besar-besaran pada perbankan (*rush*) di Indonesia tahun 1997-1998. Dalam perspektif teori *rush*, fenomena *rush* dipahami sebagai penarikan dana secara besar-besaran yang dilakukan oleh para deposan yang khawatir ketika terjadi krisis moneter, bank akan bangkrut. Dalam upaya mengantisipasi terjadinya penarikan dana maka bank menyisihkan dananya dalam bentuk cadangan kas. Upaya antisipasi tersebut dapat memicu kerugian apabila nasabah ingin menarik dananya, tetapi cadangan kas tidak mencukupi sehingga timbul situasi panik yang mengakibatkan nasabah lain juga turut menarik dananya sehingga dapat memperparah kondisi bank. Oleh sebab itu, fenomena *rush* ini dapat menyebar dari satu bank ke bank lainnya (Simorangkir, 2006). Fenomena *rush* juga disebabkan kurangnya informasi mengenai kondisi perbankan saat itu atau biasa disebut teori *asymmetric information* (Simorangkir, 2011).

Menurut perspektif teori kepercayaan masyarakat, fenomena *rush* muncul sebagai reaksi terhadap penurunan kepercayaan publik terhadap perbankan. Perbankan berfungsi sebagai pelayanan publik yang dalam kegiatan operasionalnya didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut dilihat dari keputusan masyarakat yang menyerahkan dananya pada bank untuk ditabung dengan harapan bahwa dananya akan selalu aman serta dapat ditarik setiap saat untuk memenuhi keperluan masyarakat. Akan tetapi, permasalahan akan timbul ketika kepercayaan masyarakat menurun yang nantinya berdampak pada terjadinya *rush* (Warjiyo, 2006). Penggabungan kedua perspektif teori *rush* dan kepercayaan masyarakat dapat menjelaskan bahwa penelitian ini tidak hanya berpusat terhadap proses penarikan dana secara besar-besaran, tetapi juga memperhatikan aspek kepercayaan publik pada perbankan yang berperan penting terhadap terjadinya fenomena *rush*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya di Indonesia *rush* tahun 1997-1998, mengetahui proses fenomena *rush* di Indonesia tahun 1997-1998 dan mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia terhadap *rush* tahun 1997-1998. Pentingnya penelitian ini yaitu mengetahui latar belakang terjadinya fenomena *rush* di Indonesia tahun 1997-1998. Fenomena *rush* tahun 1997-1998 menjadi titik terendah dalam dunia perbankan di Indonesia. Penyebab terjadinya fenomena *rush* pada tahun 1997-1998 selain dipicu oleh penularan krisis dari Thailand juga diakibatkan oleh penumpukan utang luar negeri yang semakin meningkat setelah kebijakan deregulasi 27 Oktober 1988.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah. Metode sejarah adalah prosedur memeriksa dan menelaah kesaksian sejarah untuk

memperoleh data yang valid dan dapat diandalkan kemudian upaya menggabungkan data menjadi cerita sejarah yang kredibel (Gottschalk, 1983). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial ekonomi karena meneliti mengenai perilaku sosial masyarakat yaitu rush terhadap lembaga ekonomi di mana dalam hal ini yaitu perbankan.

Metode sejarah yang digunakan terdapat empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tahap pertama yaitu heuristik atau pengumpulan sumber. Tahap ini peneliti mengumpulkan sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan peneliti antara lain berasal dari koran yang terbit pada periode 1997-1998. Koran yang digunakan yaitu Analisa, Berita Yudha, Bali Post, Harian Ekonomi Neraca, Kedaulatan Rakyat, Kompas, Sinar Indonesia, dan Solopos. Peneliti juga menggunakan laporan tahunan Bank Indonesia serta buku yang ditulis oleh Djiwandono yang merupakan Gubernur BI pada saat terjadi rush tahun 1997. Sumber sekunder yang digunakan peneliti seperti Boediono dan Tambunan, Data yang diungkapkan pada sumber sekunder ini dilakukan oleh seseorang yang tidak merasakan secara langsung melainkan hanya mencatat berdasarkan bukti atau pernyataan dari orang yang pernah merasakan langsung peristiwa sejarah (Daliman, 2012).

Tahap kedua yaitu kritik sumber. Kritik sumber dibagi menjadi 2 yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik ini berhubungan dengan fisik pada sumber yang akan digunakan (Priyadi, 2015). Peneliti menggunakan kritik eksternal untuk menyelidiki tanggal penerbitan koran maupun laporan tahunan, apakah diterbitkan sebelum atau sesudah peristiwa. Peneliti juga memastikan penulis laporan tahunan berasal dari lembaga yang terpercaya seperti Bank Indonesia. Kritik internal berhubungan dengan kebenaran isi dari sumber tersebut (Notosusanto, 1971). Peneliti menyelidiki isi antara satu sumber dengan sumber lain untuk memastikan kebenaran kalimat dalam sumber tersebut.

Tahap ketiga yaitu interpretasi merupakan penafsiran fakta sejarah dalam susunan membangun kembali kenyataan pada masa lampau. Fakta sejarah tersebar dan sering hilang sehingga dalam interpretasi ini fakta sejarah harus dicarikan hubungannya dengan fakta sejarah lain supaya dapat membangun suatu arti yang rasional mengenai peristiwa masa lalu (Daliman, 2012).

Tahap terakhir yaitu historiografi merupakan kegiatan penulisan sejarah di mana peneliti menggunakan pemikiran kritisnya untuk mewujudkan penggabungan seluruh temuan penelitiannya sehingga menjadi sebuah tulisan yang terstruktur dan saling terhubung (Sjamsuddin, 2007). Historiografi dalam penelitian ini dimulai dengan menulis latar belakang rush yang disebabkan karena menumpuknya utang luar negeri Indonesia kemudian diperparah dengan adanya penularan krisis dari Thailand tahun 1997 mengakibatkan Indonesia melakukan pengambungan rupiah yang berdampak terhadap penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga terjadi rush.

Hasil dan Pembahasan

Latar belakang terjadinya rush tahun 1997-1998 di Indonesia

Memasuki masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, Indonesia kembali melakukan penjadwalan utang luar negeri. Utang era Orde Baru dimulai dari pembentukan IGGI pada tahun 1967 yang merupakan forum negosiasi utang pemerintah baik bilateral maupun multilateral (Ikhsan & Basri, 1992). Adanya IGGI

atau *Inter-Governmental Group on Indonesia* ini membuka kesempatan besar bagi Indonesia untuk memperoleh pinjaman lunak baru (Boediono, 2016). Lahirnya IGGI menjadi langkah awal politik utang luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Peristiwa tersebut membuktikan dimulainya keterlibatan modal asing sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan utama dalam proses pembangunan Indonesia (Supriyanto & Sampurna, 1999).

Pinjaman lunak yang diperoleh Indonesia salah satunya dari World Bank atau Bank Dunia dengan masa pembayaran kembali atau jatuh tempo yaitu 20 tahun kemudian (Siregar, 1991). Indonesia pada tahun 1978 memperoleh pinjaman lunak dari World Bank tepatnya pada tanggal 2 Februari sebesar 109 Miliar US\$, tanggal 26 Mei sebesar 171 Miliar US\$, tanggal 30 Juni sebesar 65 Miliar US\$ dan tanggal 22 Desember sebesar 77 Miliar US\$. Seluruh pinjaman lunak tersebut masa pengembalian 20 tahun sehingga jatuh tempo pada tahun 1998 (World Bank, 1978a, 1978b, 1978c, 1978d).

Pinjaman Indonesia semakin besar ketika diterapkannya kebijakan deregulasi perbankan yaitu Pakto atau Paket Oktober. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan dalam mendirikan bank swasta nasional (Harian Neraca, 1988). Sebelum adanya kebijakan Pakto, jumlah bank swasta nasional tercatat sebanyak 64 bank. Setelah diterapkan kebijakan Pakto, jumlah bank swasta nasional meningkat hingga menjelang krisis tepatnya Juni 1997 tercatat sebanyak 160 bank (Badan Pusat Statistik, 1998; Biro Pusat Statistik, 1991). Setelah adanya kebijakan Pakto, banyak bank swasta memiliki modal yang terbatas. Kondisi perbankan dengan modal yang terbatas tersebut dapat mengganggu kegiatan operasionalnya (Rijanto, 1992). Oleh sebab itu, bank swasta melakukan pinjaman ke luar negeri sebagai tambahan modal untuk menjalankan kegiatan operasionalnya (Sharma, 2001).

Jumlah utang luar negeri swasta cenderung meningkat setiap tahunnya. Jumlah utang luar negeri swasta hampir serupa dengan jumlah utang luar negeri pemerintah (Supriyanto & Sampurna, 1999). Menjelang krisis, Jumlah utang luar negeri swasta bahkan lebih besar dibandingkan jumlah utang luar negeri pemerintah. Tahun 1997, pinjaman swasta Indonesia mendekati 65% dan pinjaman pemerintah sekitar 35% (lihat tabel 1).

Tabel 1. Utang Luar Negeri Indonesia 1993-1998

Tahun	Utang Luar Negeri Pemerintah ¹⁾	Utang Luar Negeri Swasta ²⁾
1993	52.323	28.131
1994	58.971	37.884
1995	59.864	48.244
1996	55.305	54.868
1997	51.402	82.223
1998	59.156	83.558

Sumber: World Bank, n.d.; Saputra & Wibowo, 2001

Peningkatan utang luar negeri swasta ini juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu keputusan pemerintah bahwa dalam Pelita V sebanyak 55% investasi dialokasikan dari pihak swasta. Selanjutnya, pemerintah tahun 1991 menetapkan kebijakan uang ketat yang menyebabkan suku bunga pinjaman dalam negeri tinggi sehingga mendorong sektor swasta untuk meminjam ke luar negeri di mana suku bunga pinjaman relatif rendah. Selanjutnya, Indonesia menganut sistem devisa bebas

sehingga memudahkan pihak swasta untuk meminjam ke luar negeri karena modal asing dapat keluar masuk dengan leluasa di Indonesia (Supriyanto & Sampurna, 1999).

Tahun 1997, para pengamat ekonomi menyoroti tentang jatuh tempo utang luar negeri Indonesia. Anggota DPR dari Komisi APBN, Tadjuddin Noer Said, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia harus waspada terhadap utang luar negeri yang akan jatuh tempo pada akhir 1997 dan awal 1998 yang diperkirakan 10 milyar US\$. Presiden Direktur Bank NISP sekaligus pengurus Perbanas, Pramukti Surjaudaja juga menyatakan bahwa utang luar negeri Indonesia yang berjangka pendek akan jatuh tempo pada bulan Januari 1998 yang mencapai 6,6 milyar US\$ (Kompas, 1997c).

Terkait dengan sektor swasta, menurut Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, sudah terdapat pertanda mengenai kegagalan dalam pembayaran kembali utang luar negerinya. Oleh sebab itu, Bank Indonesia harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap utang swasta. Menurutnya, boleh saja memiliki utang, tetapi yang terpenting adalah mampu mengembalikan seluruh utang tersebut (Kompas, 1997a). Pengamat pasar uang, Theo F Toemion, juga menyatakan bahwa apabila perusahaan dapat membayar kembali utangnya maka itu berdampak baik. Akan tetapi, perusahaan yang gagal membayar utangnya maka akan berdampak buruk. Utang yang sudah jatuh tempo tersebut sangat berdampak terhadap situasi rupiah. Selain itu, utang swasta yang terus menumpuk tersebut dapat memperparah kondisi perekonomian Indonesia (Kompas, 1997c).

Situasi perekonomian Indonesia pada tahun 1997 diperparah dengan adanya penularan krisis yang terjadi di Thailand. Sebelumnya, pada tanggal 2 Juli 1997 Thailand mengambangkan Baht (Analisa, 1997a). Peristiwa pengambangkan Baht tersebut memiliki dampak yang signifikan salah satunya bagi Indonesia. Hal itu disebabkan karena Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang mirip dengan Thailand (Corsetti et al., 1999). Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh spekulan fund manager dengan melakukan spekulasi dalam perdagangan di pasar valuta asing (Rafinus & Suryabrata, 1997). Salah satu spekulan yaitu George Soros pendiri Quantum Grup yang mengguncang pasar uang di Asia Tenggara salah satunya Indonesia (Berita Yudha, 1997a). Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1997 Indonesia mengambangkan rupiah untuk mengantisipasi dampak negatif dari kegiatan spekulasi tersebut (Berita Yudha, 1997b).

Melemahnya nilai rupiah disebabkan karena bertepatan dengan jatuh temponya utang swasta Indonesia. Menurut pengamat ekonomi, I Nyoman Moena, mengungkapkan bahwa mayoritas utang perusahaan di Indonesia jatuh tempo pada bulan Oktober 1997 (Berita Yudha, 1997e). Sebelum terjadi krisis 1997, sudah banyak orang yang memiliki keberanian untuk berutang, tetapi belum diketahui tentang kemampuan pelunasan utang tersebut (Tua, 1998). Ketidaktahuan tentang kemampuan pembayaran tersebut dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat (Berita Yudha, 1997d).

Melihat situasi perekonomian yang sedang terjadi di Indonesia, masyarakat mulai mengalami kepanikan sehingga menyebabkan terjadinya rush. Masyarakat banyak yang mencairkan depositonya dan membeli dolar yang kemudian berdampak terhadap perbankan karena mengalami kekurangan likuiditas (Bali Post, 1997d).

Fenomena rush perbankan di Indonesia tahun 1997-1998

Kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu diwarnai dengan isu rush perbankan misalnya di Bank Danamon. Tanggal 20 dan 21 Agustus 1997 beberapa kantor cabang Bank Danamon mengalami peningkatan aktivitas yang disebabkan kepanikan masyarakat dalam merespon kondisi moneter yang sedang terjadi di Indonesia (Bali Post, 1997c). Salah satu nasabah Bank Danamon di Tangerang, Maria, mengungkapkan bahwa ia akan mengambil seluruh tabungannya walaupun hanya berjumlah 6,2 juta. Maria mengaku lebih aman untuk menarik dananya pada saat itu juga dibandingkan tidak mendapatkan dananya sama sekali. Akan tetapi, tidak seluruh nasabah mendapatkan kembali uang tabungannya, beberapa nasabah mengaku baru memperoleh tiga perempat dari total uang tabungannya. Sementara itu, teller Bank Danamon mengungkapkan bahwa bank tersebut masih memiliki uang untuk mengembalikan dana nasabahnya, tetapi terjadinya rush di bank tersebut mengakibatkan bank harus dapat membagi uang nasabah secara adil (Kompas, 1997b).

Kepanikan nasabah Bank Danamon juga terjadi di wilayah Jakarta Utara bahkan nasabah yang belum memperoleh seluruh uang tabungannya akan kembali lagi untuk menarik dananya di keesokan harinya. Fenomena rush juga terjadi di Batam, Riau, di mana antrian nasabah terlihat hingga keluar gedung. Bank Danamon cabang Banjarmasin juga tidak luput dari serbuan nasabah. Kedatangan ratusan nasabah terlihat mulai pukul 11.00 WITA hingga pukul 21.00 WITA. Serbuan nasabah juga terlihat di loket ATM, tetapi hal tersebut belum mengurangi jumlah antrian nasabah yang hendak menarik tabungannya. Petugas Bank Danamon mengalami kelelahan karena melayani penarikan dana nasabah dari pagi hingga malam sehingga pemimpin Bank Danamon Wilayah Kalimantan, Efrain Macpal, menyarankan supaya nasabah datang pada keesokan hari, 21 Agustus 1997, untuk kembali menarik dananya. Keesokan harinya, antrian nasabah terlihat mulai pukul 08.00 WITA dan mereda pukul 14.40 WITA. Akibat serbuan nasabah tersebut, kondisi lalu lintas di sekitar bank yaitu di Jalan Lambung Mangkurat menjadi macet sehingga sejumlah satpam bank dan petugas kepolisian mengalami kesibukan dalam mengatur lalu lintas (Kompas, 1997b).

Kekhawatiran masyarakat tersebut karena mendengar isu mengenai Bank Danamon mengalami kerugian akibat kalah kliring sehingga banyak nasabah mendatangi kantor cabang Bank Danamon untuk menanyakan apakah isu tersebut benar. Wakil Divisi Umum Bidang Kesekretariatan Bank Danamon menepis bahwa isu rush dan kalah kliring tidak benar. Aktivitas Bank Danamon masih berjalan normal seperti hari biasa, tetapi terdapat peningkatan transaksi valas karena banyak nasabah yang mengalihkan simpanannya dari rupiah menjadi US\$ dan aktivitas tersebut tidak menyebabkan kerugian bagi Bank Danamon (Bali Post, 1997b).

Perkembangan selanjutnya, Pemerintah tanggal 1 November 1997 mengumumkan likuidasi ke 16 bank (Bank Indonesia, 1998). Penutupan 16 bank swasta tersebut mengakibatkan rush atau penarikan dana besar-besaran terhadap bank yang tidak dilikuidasi. Peristiwa rush pada bank swasta dibenarkan oleh Ketua Dewan Pembina Perbanas, Thomas Suyatno (Harian Ekonomi Neraca, 1997b).

Fenomena Rush yang menimpa bank tidak dilikuidasi disebabkan karena kekhawatiran nasabah akan dana yang disimpan dalam bank tersebut. Hal itu terjadi di wilayah Kisaran Sumatera Utara di mana ketiga bank swasta yaitu Bank Mestika, Bank Central Asia (BCA) dan Bank Danamon. Para nasabah tersebut banyak yang

menarik dana melalui tabungannya maupun deposito. Penarikan dana dari bank yang sehat juga terjadi di Tebing Tinggi yaitu Bank Central Asia (BCA), Lippo Bank dan Bank Danamon. Ketiga bank swasta tersebut kewalahan dalam menghadapi serbuan nasabah yang ingin mengambil uang. Meskipun begitu, ketiga bank tersebut tetap melayani nasabah dengan baik tanpa mempertimbangkan jumlah nominal yang diambil (Analisa, 1997d).



Gambar 1. Bank Danamon Medan ramai didatangi nasabah
Sumber: Sinar Indonesia, 1997b

Kepanikan masyarakat juga terjadi di kantor cabang bank yang tidak dilikuidasi yang berlokasi di Medan seperti BCA, Lippo, BII, BDNI, Bank Bali, Bank Danamon dan Bank Arya. Berdasarkan laporan koran Harian Ekonomi Neraca edisi 4 November 1997, nasabah dari bank tersebut mengalami kekhawatiran meskipun bank tempat menyimpan dananya tidak masuk daftar likuidasi. Nasabah tidak hanya menarik dananya melalui kantor cabang bank, tetapi juga melalui ATM. Sementara itu, kantor cabang Bank Indonesia di Medan terjadi peningkatan aktivitas karena bank-bank sedang menarik dananya untuk dibayarkan kepada nasabahnya. Selain itu, Kantor Cabang Bank Central Asia (BCA) di Denpasar juga mengalami kesibukan dalam melayani penarikan uang nasabah (Harian Ekonomi Neraca, 1997a).

Penarikan dana serta serbuan nasabah pada hari Selasa, 4 November 1997 mulai menurun. Nasabah yang menarik dananya yang berasal dari bank tidak terlikuidasi mulai menyimpan dananya kembali di bank tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pernyataan Gubernur Bank Indonesia yang menegaskan bahwa tidak ada likuidasi tahap kedua. Pernyataan Gubernur Bank Indonesia dapat meredam isu yang tidak benar. Sementara itu, serbuan nasabah dari bank yang dilikuidasi di Medan juga mulai berkurang (Analisa, 1997e).

Kondisi perbankan di Indonesia mulai stabil karena pada tanggal 13 November 1997 dana nasabah bank yang dilikuidasi mulai dibayar. Akan tetapi, kondisi tersebut hanya sementara karena tanggal 14 November 1997, Bank Central Asia (BCA) terkena isu yang tidak benar. Isu tersebut antara lain BCA kekurangan likuiditas akibat banyak menolong bank lain, penutupan Kantor Cabang BCA di Singapura akibat penarikan dana besar-besaran serta kalah valuta asing. Seorang nasabah mengungkapkan bahwa ia mendengar isu tersebut sejak hari Kamis malam, 13 November 1997. Isu tersebut menyebar secara luas dengan kurun waktu yang cepat (Analisa, 1997g).

Isu BCA lainnya yaitu meninggalnya Liem Sioe Liong yang merupakan petinggi BCA. Seluruh isu yang menimpa BCA akhirnya dibantah oleh manajemen BCA bahwasanya BCA tidak memiliki kantor cabang di Singapura, tetapi hanya sebagai representative office di mana tidak membuka layanan operasional bank dan kantor tersebut masih buka. Kemudian, untuk membantah isu meninggalnya petinggi BCA tersebut, putra dari Liem Sioe Liong, Anthony Salim, menghadirkan Liem Sioe Liong ke Jakarta (Harian Ekonomi Neraca, 1997c). Liem Sioe Liong terlihat dalam tayangan TVRI yaitu Dunia dalam Berita dalam kondisi sehat. Sementara itu, isu tentang likuidasi BCA juga dibantah oleh pemimpin BCA Cabang Medan, Rudy Santosa, bantahan tersebut diperjelas oleh Ketua Tim Pengawasan Perbankan BI Cabang Medan, Hadi Pranowo, serta Wakil Kepala Cabang Bank Indonesia di Singapura, Lukman Benyamin (Analisa, 1997g).



Gambar 2. Serbuan nasabah di ATM BCA, Kantor Capem Medan di Jalan Asia.
Sumber: Analisa, 1997g

Sejumlah isu yang tidak benar mengakibatkan terjadinya rush di BCA. Meskipun demikian, Kantor Pusat BCA menghimbau supaya seluruh cabang bank tersebut untuk melayani penarikan dana nasabahnya. Fenomena rush ini terjadi salah satunya di Medan yaitu pada tanggal 14 November 1997 di kantor cabang pembantu BCA tepatnya di Jalan Yos Sudarso Pulo Brayan dipadati oleh nasabah sejak pukul 9.00 WIB. Selain itu, mesin ATM BCA yang diletakkan di bank tersebut maupun yang berada di pusat perbelanjaan juga didatangi oleh nasabah hingga menyebabkan antrian (Analisa, 1997g).

Serbuan nasabah BCA ini juga menyulitkan para karyawan bank tersebut. Karyawan bank BCA di Medan bahkan menggunakan alat pengeras suara supaya nasabah tidak panik dan khawatir akan dana tabungannya karena BCA masih mampu membuka pelayanan hingga seluruh nasabah terlayani dengan baik. Akan tetapi, himbauan karyawan bank tersebut diabaikan oleh para nasabah sehingga kepanikan tetap terjadi. Seorang nasabah mengungkapkan bahwa akan menarik seluruh tabungannya, mengingat kasus penarikan dana di BCA terjadi pada hari Jum'at. Di lain sisi, pemerintah selalu mengumumkan kebijakannya pada hari Sabtu seperti saat pengumuman penutupan 16 bank yang dilikuidasi (Analisa, 1997g).

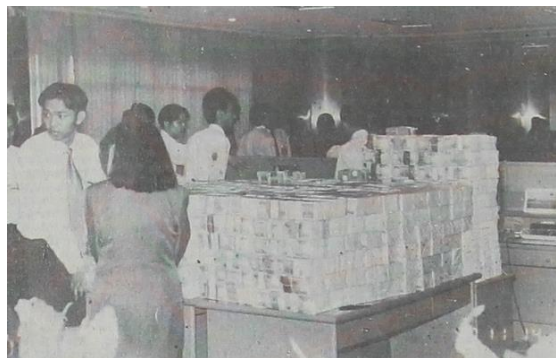
Penarikan dana nasabah BCA pada awalnya dijadwalkan hingga pukul 20.00 WIB, tetapi meningkatnya nasabah yang hendak mengambil tabungannya menyebabkan jam operasional menyesuaikan hingga seluruh nasabah telah dilayani. Berdasarkan laporan koran Analisa edisi 15 November 1997, pukul 22.00 WIB mulai

berkurang nasabah yang datang ke BCA. Namun, seluruh cabang BCA tetap membuka layanan untuk berjaga-jaga apabila terdapat nasabah yang hendak menarik dananya bahkan di hari Sabtu tetap buka (Analisa, 1997g).



Gambar 3. Nasabah datangi BCA Cabang Medan di Jalan Bukit Barisan
Sumber: Analisa, 1997g

Peningkatan nasabah yang datang ke Kantor Cabang BCA di Medan menyebabkan kemacetan. Lalu lintas di Medan sejak pukul 11.00 WIB hingga malam hari masih ramai akibat serbuan nasabah. Langkah yang diambil oleh pihak Polantas yaitu ditutupnya beberapa jalan yang berada di sekitar area Kantor Cabang BCA yaitu, “Jalan Diponegoro mulai dari simpang Diponegoro/Sudirman hingga Diponegoro/H. Zainul Arifin. Beberapa jalan yang ditutup dialihkan menjadi tempat parkir para nasabah. Sementara itu, jalanan di Medan yang ramai antara lain Jalan Bukit Barisan sekitar Lapangan Merdeka, Jalan Asia, mulai simpang Jalan Thamrin hingga Sutomo serta Jalan Iskandar Muda, mulai Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Zainul Arifin dan Jalan Yos Sudarso Pulo Brayan mulai arah Pelita hingga persimpangan Jalan Pertempuran” (Analisa, 1997g).



Gambar 4. Tumpukan uang nasabah BCA Cabang Medan
Sumber: Sinar Indonesia, 1997c

Rush yang terjadi di BCA tidak berjalan lama di mana keesokan harinya tanggal 15 November 1997 kondisi BCA sudah berjalan normal. Pada tanggal tersebut tidak banyak nasabah yang datang ke Kantor Cabang BCA serta arus lalu lintas terpantau lancar. Selain itu, beberapa nasabah mulai menabung kembali di BCA setelah sebelumnya menarik dananya. Meskipun demikian, Kantor Cabang BCA di Medan tetap memperpanjang jam operasional di hari Sabtu hingga pukul

15.00 WIB untuk melayani nasabah yang hendak mengambil dananya maupun menabung kembali. Sebelumnya, dana yang telah ditarik oleh nasabah BCA di seluruh Indonesia saat rush mencapai Rp 500 milyar (Analisa, 1997h).

Perkembangan selanjutnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan yaitu Fuad Bawazier didampingi ketua BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) mengumumkan 7 bank yang dibekukan dan 7 bank dalam pengawasan BPPN (Bali Post, 1998b). Pengumuman bank dalam pengawasan menyebabkan nasabah khawatir dan mengalami kepanikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nasabah bank dalam pengawasan yang berbondong-bondong mengambil uangnya melalui ATM. Salah satu nasabah Bank Danamon, Putu Eka Suarjana, mengungkapkan bahwa di hari Minggu, 5 April 1998, ia hendak mengambil uang melalui ATM di Cabang Pembantu Danamon di Bilangan Hayam Wuruk Denpasar, tetapi ATM tersebut tidak berfungsi. Pengumuman dari direktur bank tersebut yang ditempel di pintu ATM menjelaskan bahwa ATM tidak berfungsi karena terjadi peningkatan transaksi di mesin ATM sehingga layanan transaksi dapat dilakukan di kantor cabang terdekat sesuai jam operasional. Mesin ATM di pusat perbelanjaan juga mengalami gangguan, tetapi gangguan itu hanya berlaku di bank yang dalam pengawasan sedangkan mesin ATM di bank yang tidak masuk daftar pengawasan BPPN dapat berfungsi normal. Hal serupa dapat ditemui di Kantor Cabang BDNI di Jalan Diponegoro Denpasar yang terlihat sepi, tetapi mesin ATM masih belum bisa berfungsi (Bali Post, 1998c).

Bank Danamon yang berada di Bali tepatnya di Jalan Gunung Agung pada hari Senin, 6 April 1998 terjadi rush sejak pagi. Peningkatan jumlah nasabah menyebabkan beberapa nasabah tidak dapat masuk sehingga hanya bisa menunggu di tangga. Selain itu, terdapat nasabah yang berkerumun di depan loket bank. Serbuan nasabah tersebut terlihat hingga menjelang sore hari, beberapa petugas bank juga melayani nasabah untuk mendapatkan informasi melalui telepon. Karyawan dan Satpam juga terlihat baru saja mengambil karung uang dari Bank Indonesia (Bali Post, 1998d).



Gambar 5. Serbuan nasabah Bank Danamon di Jalan Pemuda, Medan
Sumber: Sinar Indonesia, 1998

Bank Danamon yang berada di Medan tepatnya di Jalan Iskandar Muda dan Jalan Pemuda juga mengalami rush. Antrian nasabah tersebut dimulai hari Senin, 6 April 1998. Bank Danamon yang berada di Jalan Sudirman, Samarinda, juga dipadati nasabah sejak pukul 07.00 WITA dan saat pukul 09.00 WITA nasabah yang sudah antri di ketiga loket di bank tersebut sebanyak 35 orang (Sinar Indonesia,

1998). Serbuan nasabah yang hendak menarik dananya di Bank Danamon pada hari Senin, 6 April 1998, juga terjadi di wilayah Surabaya, Pekanbaru, Palu dan Banjarmasin. Antrian nasabah di Pekanbaru terlihat sejak pukul 07.30 WIB sedangkan nasabah di Bank Danamon di Palu terlihat sudah antri sejak pukul 06.00 WITA atau sebelum bank jam operasional bank buka (Sinar Indonesia, 1998).

Sejumlah nasabah Bank Danamon Cabang Denpasar berpendapat bahwa ia melakukan penarikan seluruh dananya karena trauma dari pengalaman sebelumnya. Salah seorang nasabah menjelaskan bahwa dana yang sudah ia tarik akan dialihkan ke BRI cabang Denpasar. Penarikan dana tersebut juga dilakukan melalui mesin ATM (Bali Post, 1998e). Selain Bank Danamon, Bank dalam pengawasan di wilayah Surabaya juga terjadi rush Serbuan nasabah tersebut juga mengakibatkan BUN dan Bank Danamon kehabisan uang sehingga nasabah harus menunggu pimpinan bank tersebut untuk mengambil uang ke Bank Indonesia (Sinar Indonesia, 1998).

Penarikan dana juga terjadi di Bank Umum Nasional Jakarta tepatnya di Jalan Melawai (Blok M) Jakarta Selatan (Harian Ekonomi Neraca, 1998). Peristiwa rush juga terjadi di Semarang yaitu cabang Bank Danamon Jalan Pemuda, Jalan Majapahit dan Jalan MT Haryono lalu untuk cabang BDNI di Jalan Pemuda dan Jalan Peterongan kemudian untuk cabang Bank Exim di Jalan Mpu Tantular serta cabang Bank Umum Nasional berada di Jalan Pandanaran (Solopos, 1998a).

Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap rush tahun 1997-1998

1. Pengetatan Likuiditas

Pemerintah Indonesia melakukan pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga SBI yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap rupiah yang sedang mengalami kemerosotan (Analisa, 1997c). Tanggal 18 Agustus 1997 Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI untuk 1 minggu dari 10,5% menjadi 20% lalu untuk 2 minggu dari 11% menjadi 22% kemudian untuk 1 bulan dari 11,62% menjadi 30% dan untuk 3 bulan dari 11,5% menjadi 28% (Bank Indonesia, 1998). Sementara itu, untuk 6 bulan dan 12 bulan tidak berubah. Kenaikan suku bunga SBI menjadi upaya untuk memperketat likuiditas. Pengetatan tersebut bertujuan supaya mengurangi banyaknya permintaan dolar (Bali Post, 1997a). Sebelum pengambangan rupiah, 13 Agustus 1997, pemerintah juga telah menaikkan suku bunga SBI overnight dari 14% menjadi 15% (Bank Indonesia, 1998).

Pengetatan likuiditas yang masih dilakukan juga menyebabkan tingkat suku bunga deposito maupun kredit mengalami kenaikan pada bulan Agustus 1997. Suku bunga deposito 3 bulan pada bank pemerintah yaitu 26,2%. Terdapat suku bunga kredit perbankan yang naik mencapai 48% di akhir Agustus 1997. Suku bunga SBI overnight turut mengalami kenaikan yang mencapai 144% di tanggal 21 Agustus 1997 (Rafinus & Suryabrata, 1997). Sementara itu, tanggal 21 Agustus 1997, beberapa perbankan menaikkan suku bunga deposito sebagai dampak dari pengetatan likuiditas. Sementara itu, Bank Bali dan Bank Jaya sudah menaikkan suku bunga deposito sebanyak 2 kali pada awal Agustus 1997. Kenaikan suku bunga deposito diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menyimpan kembali tabungannya di bank (Analisa, 1997b).

Tabel 2. Suku bunga deposito perbankan

Nama Bank	Jangka waktu bunga deposito rupiah (bulan)			
BDN	30%	28%	14%	14,5%
Bali	25%	22%	16%	16%
BCA	22%	20%	16%	16%
BII	17%	17%	17%	17%
Jaya	20%	18%	17%	16%
Subentra	30%	28%	15%	15%

Sumber: Analisa, 1997b

Tanggal 15 hingga 22 Agustus 1997, pengetatan likuiditas lain dilakukan dengan cara pemerintah mengalihkan dana BUMN seperti PT Jamsostek dan Dana Pensiun BUMN ke dalam SBI (Joseph et al., 1999). Dana yang dialihkan sebesar 2 triliun, pengalihan dana tersebut merupakan langkah yang efektif untuk menaikkan dan menyeimbangkan rupiah yang sedang merosot. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan posisi rupiah yang kembali menguat pada tanggal 20 Agustus 1997 (Berita Yudha, 1997c). Pengalihan dana dari BUMN ke SBI juga pernah terjadi sebelumnya pada masa JB Sumarlin sebagai menteri keuangan. Sumarlin menginstruksikan bank pemerintah untuk mengalihkan dana kepada SBI (Berita Yudha, 1997c).

2. Bantuan Likuiditas

Upaya pemerintah dalam mempertahankan posisi rupiah supaya lebih stabil antara lain dengan menerapkan kebijakan fiskal yaitu dengan mengurangi pengeluaran rutin lalu kebijakan moneter yaitu BI menghentikan pembelian SBPU pada akhir Juli 1997 serta meningkatkan suku bunga SBI lalu dengan mengalihkan dana BUMN dan yayasan menjadi SBI (Djiwandono, 2001).

Dampak dari pengetatan likuiditas tersebut menghasilkan kelangkaan likuiditas pada perbankan (Bank Indonesia, 2003). Perbankan yang mengalami kekurangan likuiditas akan berupaya memperoleh likuiditas melalui pinjaman antar bank yang diperoleh dari Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Suku bunga PUAB yang sangat tinggi mencapai 100% bahkan diambil oleh bank supaya dapat memperoleh likuiditas (Bali Post, 1997d). Penarikan rupiah yang semakin melonjak yang bertujuan untuk membeli Dollar turut memperparah kondisi ini (Bank Indonesia, 2003). Ketika di PUAB tidak tersedia maka bank akan menggunakan dananya sendiri yang berada di Bank Indonesia. Akan tetapi, dana bank yang terus ditarik di BI akan mengakibatkan pelanggaran GWM. Pelanggaran GWM berarti bahwa giro bank pada BI berada di bawah 5% dari dana pihak ketiga seperti yang terjadi pada Agustus 1997 (Djiwandono, 2001).

Kondisi keuangan perbankan yang melanggar ketentuan GWM selama krisis semakin meningkat. Jumlah bank yang melanggar ketentuan GWM saat tanggal 14 Agustus 1997 mencapai 14 bank dan saat akhir Agustus 1997 mencapai 51 bank. Pelanggaran GWM yang dilakukan terus menerus akhirnya menyebabkan terjadinya saldo debit pada perbankan (Djiwandono, 2001). Tanggal 15 Agustus 1997, Bank Indonesia telah melaksanakan rapat direksi BI di mana isi rapat tersebut memutuskan untuk memberi keringanan terhadap bank yang bersaldo debit untuk dapat mengikuti kliring (Bank Indonesia, 2003). Bank Indonesia tanggal 26 Agustus 1997 juga telah menginjeksi dana kepada bank-bank kecil sebesar 300-500 juta dollar

AS. Tujuan injeksi tersebut untuk menolong bank-bank kecil yang sedang mengalami permasalahan dalam likuiditas mereka (Sinar Indonesia, 1997a).

Pasca pengumuman 16 bank likuidasi, pemerintah juga memberikan dana talangan kepada nasabah yang berasal dari bank dalam likuidasi. Tujuan dana talangan tersebut untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada perbankan Indonesia. Pembayaran kembali uang nasabah dilakukan dalam 2 tahap (Bank Indonesia, 2003). Pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal 13 November 1997 (Analisa, 1997f). Pembayaran tahap kedua dilakukan tanggal 6 Maret 1998 (Bali Post, 1998a).

Jumlah dana talangan tahap pertama sebesar Rp 1.642.280.000.000,00. Sementara itu, dana talangan tahap kedua sebesar Rp 3.692.723.344.835,81 (Bank Indonesia, 2003). Keenambelas bank dalam likuidasi hanya satu bank yang tidak menerima dana talangan yaitu Bank Andromeda. Alasan tidak memperoleh dana talangan karena Bank Andromeda masih memiliki tabungan yang cukup untuk mengembalikan dana nasabahnya. Oleh karena itu, jumlah BLBI yang diberikan untuk ke-15 BDL sebanyak Rp11,89 triliun (Listiyanto, 2011). Bantuan likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih dikenal sebagai BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Istilah tersebut mulai dikenal setelah penandatanganan Letter of Intent tanggal 15 Januari 1998. Dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa BLBI penting untuk menolong bank yang kekurangan likuiditas (Bank Indonesia, 2003).

3. Blanket Guarantee

Krisis nilai tukar di Indonesia tahun 1997 semakin diperparah dengan adanya masalah internal setiap bank. Penyebaran masalah yang tidak berhasil dihentikan dapat mengakibatkan efek contagion atau penularan dengan cepat antara bank yang sudah sakit ke bank yang masih sehat. Peristiwa tersebut dapat menimbulkan risiko sistemik terhadap sistem perbankan (Bank Indonesia, 1998). Solusi untuk menghindari risiko tersebut adalah pemerintah menerapkan program jaminan terhadap uang nasabah. Nasabah dapat menerima seluruh uangnya apabila bank tempat menabung sedang mengalami permasalahan. Pemerintah melalui Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998 menetapkan jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum baik untuk nasabah yang menyimpan uang maupun kreditur (Bank Indonesia, 1998).

Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad, menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menjamin para deposan maupun kreditor. Alasannya karena hal tersebut berkaitan dengan 3 hal yaitu bank asing menolak L/C dari Indonesia, terjadinya rush dan bank domestik enggan memberi pinjaman kepada bank lain. Gubernur BI, Soedradjad Djiwandono, mengungkapkan bahwa program jaminan ini berlangsung setidaknya selama 2 tahun. Berakhirnya program jaminan ini akan diumumkan 6 bulan sebelumnya. Pada perkembangan berikutnya sebagai tindak lanjut dari tahapan kebijakan penyehatan perbankan, pemerintah akan menggunakan sistem asuransi simpanan. Tata cara dalam melaksanakan sistem tersebut sedang dalam pengkajian Bank Indonesia yang dibantu oleh Bank pembangunan Asia (Analisa, 1998a).

Keikutsertaan bank dalam program jaminan pemerintah bersifat tidak wajib. Akan tetapi, program jaminan pemerintah merupakan salah satu langkah dari upaya restrukturisasi sistem perbankan yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan

masyarakat terhadap perbankan sehingga hampir seluruh bank di Indonesia terlibat dalam program jaminan pemerintah (Bank Indonesia, 1998).

Perbankan yang mengikuti program jaminan pemerintah harus mengikuti persyaratan yang telah dibuat yaitu menyerahkan "fee" sebanyak 0,5% ke bank sentral dari seluruh simpanan pihak ketiga dan pinjaman yang dijamin oleh Bank Indonesia setiap 6 bulan sekali. Jaminan tidak akan diberikan kepada utang pemilik saham dan utang subordinasi (Analisa, 1998b). Peraturan lainnya yaitu suku bunga tidak boleh melampaui suku bunga pasar dan ekspansi kredit dibatasi pertumbuhannya sebesar 2% per bulan supaya perbankan tidak mengambil kesempatan untuk meminjam dari luar negeri (Berita Yudha, 1998). Persyaratan "fee" yang sudah diserahkan ke bank sentral tidak akan kembali ke bank-bank nasional setelah 2 tahun karena akan digunakan untuk asuransi deposito. Menurut Direktur Bank Indonesia, Mukhlis Rasyid, program jaminan ini dapat diperpanjang dengan menyesuaikan tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan Indonesia (Analisa, 1998b).

Program jaminan yang sudah ditetapkan pada bulan Januari 1998 menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan restrukturisasi perbankan salah satunya pengumuman mengenai 7 bank yang dibekukan dan 7 bank dalam pengawasan BPPN pada tanggal 4 April 1998 (Bali Post, 1998b). Kepanikan nasabah setelah mendengar pengumuman 7 bank dibekukan dan 7 bank dalam pengawasan BPPN masih tetap terjadi. Serbuan nasabah terjadi pada bank dalam pengawasan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun, serbuan nasabah sudah mulai mereda setelah tanggal 8 April 1998. Hal tersebut disebabkan karena nasabah belum memahami secara mendalam mengenai pengumuman 14 bank yang bermasalah sehingga nasabah merasa terkejut dengan adanya pemberitaan tersebut (Bali Post, 1998e).

Pengumuman pembekuan dan pengawasan bank oleh BPPN tanggal 4 April 1998 menimbulkan kepanikan masyarakat, tetapi masih terdapat nasabah yang percaya akan dananya yang dijamin oleh pemerintah. Seorang nasabah Bank Danamon menyatakan bahwa ia tidak melakukan penarikan dana karena masih percaya bahwa dananya dijamin oleh pemerintah (Solopos, 1998b). Salah satu nasabah BDNI Cabang Yogyakarta, juga tidak terhasut dengan kepanikan masyarakat yang menarik dana. Nasabah tersebut menaruh kepercayaan kepada pemerintah sebagai penjamin uang tabungannya sehingga ia tidak mempermasalahkan mengenai pengumuman bahwa BDNI masuk daftar bank pengawasan (Kedaulatan Rakyat, 1998).

Adanya program jaminan pemerintah, masyarakat perlahan mulai menaruh kepercayaan kembali terhadap perbankan yang dapat dibuktikan dengan penyetoran dana secara bertahap kepada perbankan (Bank Indonesia, 1998). Hal tersebut terlihat ketika pemerintah mengumumkan mengenai 40 bank di mana 30 bank masuk dalam pengawasan BPPN dan 10 bank keluar dari pengawasan BPPN. Setelah pemerintah mengumumkan berita tersebut tidak terlihat nasabah yang menyerbu perbankan. Salah satu nasabah Bank Aken yang termasuk dalam pengawasan BPPN mengungkapkan bahwa program jaminan pemerintah telah berhasil membuat masyarakat kembali menaruh kepercayaan terhadap perbankan (Bali Post, 1998f).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya rush yaitu karena utang luar negeri swasta yang terus membengkak dan terjadinya penularan karena krisis Baht di Thailand. Utang luar negeri Indonesia yang semakin meningkat terutama utang swasta mengakibatkan kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk. Penyebab peningkatan utang swasta karena adanya kebijakan Pakto yang memberikan kebebasan untuk mendirikan bank swasta. Menjelang tahun 1997, banyak pemberitaan yang menyoroti jatuh tempo utang swasta di tahun 1998 dan menyebabkan masyarakat mengalami kepanikan. Hal tersebut diperparah dengan adanya penularan akibat terjadinya krisis Baht di Thailand. Penularan tersebut mengakibatkan tekanan pada rupiah yang pada akhirnya pemerintah harus mengambil kebijakan yaitu pengambalian nilai rupiah. Melemahnya nilai rupiah mengakibatkan pembayaran utang luar negeri semakin berat khususnya pada sektor swasta yang turut memperburuk kondisi perekonomian Indonesia dan akhirnya menyebabkan fenomena rush terjadi. Melihat situasi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk maka Pemerintah meminta bantuan kepada IMF. Salah satu program IMF yaitu penutupan 16 bank, tetapi program tersebut menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin menurun. Pasca penutupan 16 bank, masyarakat mengalami kepanikan dan takut sehingga terjadi rush di bank yang bahkan tidak ditutup oleh pemerintah. Bank tersebut antara lain BCA, Bank Danamon, Bank Mestika, Lippo Bank, BII, BDNI dan Bank Bali. Rush juga terjadi ketika pemerintah tanggal 4 April 1998 mengumumkan 7 bank dalam pengawasan. Bank yang mengalami rush antara lain Danamon, BDNI, Bank Exim dan BUN. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi rush yaitu dengan mengetatkan likuiditas dengan cara menaikkan suku bunga. Selanjutnya, memberi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap bank-bank yang terkena rush serta memberikan jaminan kepada nasabah atau disebut Blanket Guarantee. Ketiga kebijakan tersebut tidak secara langsung dapat mengatasi rush, tetapi secara bertahap dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Referensi

- Abdulgani, R. (1998, 1 Mei). Hubungan IMF-Indonesia dan utang luar negeri swasta. *Bali Post*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/176715/sheet>.
- Analisa. (1997a, 3 Juli). Baht tumbang 17,6% terhadap Dolar AS. *Analisa*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/105770/sheet>.
- Analisa. (1997b, 22 Agustus). Agar masyarakat tidak panik: Bunga SBI sebaiknya segera diturunkan. *Analisa*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/105860/sheet>.
- Analisa. (1997c, 10 September). Pemerintah harapkan bunga bank turun. *Analisa*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/105307/sheet>.
- Analisa. (1997d, 4 November). Nasabah serbu bank-bank yang terkena likuidasi. *Analisa*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/103597/sheet>.
- Analisa. (1997e, 5 November). Serbuan nasabah mulai reda. *Analisa*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/103697/sheet>.

- Analisa. (1997f, 14 November). Pembayaran dana nasabah lancar. *Analisa*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/103852/sheet>.
- Analisa. (1997g, 15 November). Akibat isu-isu BCA diserbu. *Analisa*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/103890/sheet>, <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/103891/sheet>.
- Analisa. (1997h, 16 November). Nasabah BCA Medan yang tarik dananya tidak sampai 10 persen. *Analisa*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/103927/sheet>.
- Analisa. (1997i, 25 November). BI: Utang swasta yang jatuh tempo 9,6 Milyar Dolar. *Analisa*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/104199/sheet>.
- Analisa. (1998a, 28 Januari). Pemerintah berikan jaminan penuh. *Analisa*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/103157/sheet>.
- Analisa. (1998b, 29 Januari). Bank yang dijamin BI bayar fee 0,5%". *Analisa*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/103133/sheet>.
- Badan Pusat Statistik. (1998). *Statistik Indonesia 1997*. Badan Pusat Statistik.
- Bali Post. (1997a, 20 Agustus). Keadaan agak darurat BI naikan bunga SBI. *Bali Post*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/33962/sheet>.
- Bali Post. (1997b, 22 Agustus). Isu "rush" perbankan meluas ke daerah. *Bali Post*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/34002/sheet>.
- Bali Post. (1997c, 30 Agustus). Danamon tak pernah main valas. *Bali Post*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/34163/sheet>.
- Bali Post. (1997d, 27 Oktober). Penurunan SBI belum turunkan bunga bank. *Bali Post*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/175583/sheet>.
- Bali Post. (1998a, 4 Maret). Uang nasabah BDL dibayar 6 Maret. *Bali Post*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/176277/sheet>.
- Bali Post. (1998b, 5 April). Tujuh bank dibekukan tujuh diawasi. *Bali Post*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/175992/sheet>.
- Bali Post. (1998c, 6 April). Nasabah kecewa tak bisa tarik uang melalui ATM. *Bali Post*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/176020/sheet>.
- Bali Post. (1998d, 8 April). Bank Danamon ilanda rush. *Bali Post*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/176061/sheet>.
- Bali Post. (1998e, 9 April). Rush di Bank Danamon berlanjut. *Bali Post*. [https://mpn.komdigi.go.id/arsip/detail/176109/sheet?q=8 april 1998](https://mpn.komdigi.go.id/arsip/detail/176109/sheet?q=8%20april%201998).
- Bali Post. (1998f, 23 April). Kegiatan bank dalam pengawasan BPPN normal. *Bali Post*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/176443/sheet>.
- Bank for International Settlements. (1998). *The maturity, sectoral and nationality distribution of international bank lending first half 1997*. Basle: Bank for International Settlements Monetary and Economic Department.
- Bank Indonesia. (1998). *Report for the Financial Year 1997 / 1998*. Bank Indonesia.

- Bank Indonesia. (2003). *Mengurai Benang Kusut BLBI edisi II*. Bank Indonesia.
- Berita Yudha. (1997a, 9 Agustus). Ribuan "Soros" ikut goyang mata uang Asteng. *Berita Yudha*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/116437/sheet>.
- Berita Yudha. (1997b, 15 Agustus). Pemerintah ambangkan rupiah. *Berita Yudha*. [https://mpn.komdigi.go.id/arsip/detail/116503/sheet?q=langkah BI cerdas](https://mpn.komdigi.go.id/arsip/detail/116503/sheet?q=langkah%20BI%20cerdik).
- Berita Yudha. (1997c, 21 Agustus). Rp 2 triliun sudah efektif. *Berita Yudha*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/116563/sheet>.
<https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/116573/sheet>.
- Berita Yudha. (1997d, 16 September). Diperkirakan, gejolak moneter akan berlanjut hingga SU-MPR'98. *Berita Yudha*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/116870/sheet>.
- Berita Yudha. (1997e, 8 Oktober). Dolar AS tembus angka 4.000. *Berita Yudha*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/117121/sheet>.
- Berita Yudha. (1998, 29 Januari). 70 bank.... *Berita Yudha*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/117925/sheet>.
- Biro Pusat Statistik. (1991). *Statistik Indonesia 1990*. Biro Pusat Statistik.
- Boediono. (2016). *Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah*. PT Mizan Pustaka.
- Corsetti, G., Pesenti, P., & Roubini, N. (1999). *What caused the Asian currency and financial crisis?* (No. 343; Temidi Discussion Del Servizio Studi).
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Ombak.
- Darmawan, K. (1998, 26 Januari). Badai itu tak kunjung berlalu. *Bali Post*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/175446/sheet>.
- Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. *Journal of Political Economy*, 91(3), 401–419. <https://doi.org/10.1086/261155>.
- Dijk, O. (2017). Bank run psychology. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 144, 87–96. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.08.005>.
- Djiwandono, J. S. (2001). *Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis*. Pustaka LP3ES.
- Fane, G., & McLeod, R. H. (1999). Lessons for monetary and banking policies from the 1997-98 economic crises in Indonesia and Thailand. *Journal of Asian Economics*, 10(3), 395–413. [https://doi.org/10.1016/S1049-0078\(99\)00033-0](https://doi.org/10.1016/S1049-0078(99)00033-0).
- Gottschalk, L. (1983). *Mengerti Sejarah*. UI Press.
- Harian Ekonomi Neraca. (1997a, 4 November). Sejumlah bank kena rush. *Harian Ekonomi Neraca*, 3.
- Harian Ekonomi Neraca. (1997b, 11 November). Perbanas akui ada rush di bank swasta. *Harian Ekonomi Neraca*, 3.
- Harian Ekonomi Neraca. (1997c, 15 November). BCA rush: Karena rumor Oom Liem meninggal. *Harian Ekonomi Neraca*, 1.

- Harian Ekonomi Neraca. (1998, 8 April). Rush di mana-mana. *Harian Ekonomi Neraca*, 1.
- Harian Neraca. (1988,2 November). Pendirian bank swasta & bank koperasi. *Harian Neraca*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/95587/sheet>.
- Ikhsan, M., & Basri, M. C. (1992). Tinjauan triwulan perekonomian Indonesia. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 40(2), 69–105. <https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/199205.pdf>.
- Joseph, C. P. R., Hartawan, A., & Mochtar, F. (1999). Kondisi dan respon kebijakan ekonomi makro selama krisis ekonomi tahun 1997-98. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 2(2), 97–130. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i2.198>.
- Kasri, R. A., Arundina, T., Indraswari, K. D., & Prasetyo, M. B. (2017). Bank run and stability of islamic banking in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3(1), 25–60. <https://jimf-bi.org/JIMF/article/view/709>.
- Kedaulatan Rakyat. (1998, 9 April). Serbuan nasabah tak membuat takut. *Kedaulatan Rakyat*, 1.
- Kompas. (1997a, 18 Juli). Ada indikasi, swasta mulai gagal bayar utang. *Kompas*, 2.
- Kompas. (1997b, 22 Agustus). Nasabah Bank Danamon termakan isu. *Kompas*, 2.
- Kompas. (1997c, 15 September). Waspada kredit luar negeri yang jatuh tempo. *Kompas*, 1,15.
- Listiyanto, A. (2011). Pengelolaan aset eks bank dalam likuidasi. *Media Kekayaan Negara*, 2(7), 5–8.
- Na'im, A. (2001). Hutang luar negeri pemicu krisis ekonomi Indonesia. *Unisia*, 43, 515–527. <https://journal.uui.ac.id/unisia/article/view/5713>.
- Notosusanto, N. (1971). *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sedjarah*. Departemen Pertahanan Keamanan.
- Nugroho, A. E. (2000). *The Linkage Between Banking Sector, Economic Fundamentals and The Indonesian Currency Crisis*. Thesis. Massey University
- Pangestu, M., & Oscarita M, T. (1989). Tinjauan triwulan perekonomian Indonesia. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 37(1), 3–48. <https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/198901.pdf>.
- Priyadi, S. (2015). *Historiografi Indonesia*. Ombak.
- Putra, R. M. S. (1993,30 Juni). Mobilisasi dana dan perbankan. *Harian Ekonomi Neraca*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/detail/91694/sheet?q=Mobilisasi%20dana%20dan%20perbankan>.
- Rafinus, B. H., & Suryabrata, W. A. (1997). Tinjauan triwulan perekonomian Indonesia. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, XLV(3), 373–397. <https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/199713.pdf>.

- Rijanto. (1992). Analisis penyebab dan dampak krisis manajemen bank paska Pakto 1988. In *Makalah disampaikan pada Studium Generale*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 14 Desember 1992.
- Saputra, R. D., & Wibowo, D. M. (2001). Perkembangan Pinjaman Luar Negeri Indonesia. In H. Yumanita, D & Sigalingging (Ed.), *Profil Pinjaman Luar Negeri Indonesia dan Permasalahannya*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Sharma, S. D. (2001). The Indonesian Financial Crisis: From Banking Crisis to Financial Sector Reforms, 1997-2000. *Indonesia*, 71, 79-110. <https://doi.org/10.2307/3351457>.
- Simorangkir, I. (2006). Determinan bank runs pada krisis perbankan 1997/1998: Suatu kajian dengan menggunakan panel data dinamis. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 9(2), 99-143. <https://doi.org/10.21098/bemp.v9i2.201>
- Simorangkir, I. (2011). Penyebab bank runs di Indonesia: Bad luck Atau fundamental? *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 14(1), 51-78. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i1.456>
- Sinar Indonesia. (1997a, 28 Agustus). BI injeksi bank kecil Rp 800 miliar-Rp 1,35 triliun. *Sinar Indonesia*, 1.
- Sinar Indonesia. (1997b, 4 November). Nasabah tarik dana. *Sinar Indonesia*, 11.
- Sinar Indonesia. (1997c, 15 November). BCA diserbu nasabah tarik dana. *Sinar Indonesia*, 1.
- Sinar Indonesia. (1998, 7 April). Rush besar-besaran di 6 bank kota Medan. *Sinar Indonesia*, 1, 11.
- Siregar, M. (1991). *Pinjaman Luar Negeri & Pembiayaan Pembangunan di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Solopos. (1998a, 8 April). Banyak nasabah menutup rekening di sejumlah bank. *Solopos*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/50525/sheet>.
- Solopos. (1998b, 8 April). BDI Solo siapkan dana siaga Rp 11 miliar. *Solopos*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/50519/sheet>.
- Supriyanto & Sampurna, A. F. (1999). *Utang Luar Negeri Indonesia: Argumen Relevansi dan Implikasinya bagi Pembangunan*. Djambatan.
- Tambunan, T. (2011). *Memahami Krisis: Siasat Membangun Kebijakan Ekonomi*. LP3ES.
- Tua, P. (1998, 5 Januari). Membayar hutang dan moralitas manusia. *Analisa*. <https://mpn.komdigi.go.id/arsip/page/103126/sheet>.
- Warjiyo, P. (2006). Stabilitas sistem perbankan dan kebijakan moneter: Keterkaitan dan perkembangannya di Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 8(4), 429-454.
- World Bank. (n.d.). *International Debt Statistics*.

<https://databank.worldbank.org/source/international-debt-statistics>. Diakses tanggal 7 January 2026.

- World Bank. (1978a). *Announcement of Indonesia Receives Sixty-Five Million Dollars World Bank Loan for Agricultural Settlement on June 30, 1978 (English)*. Bank News Release; no. 1978-123. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099701508102238601>.
- World Bank. (1978b). *Announcement of World Bank Approves One Hundred Seventy-One Million Dollars for Irrigation in Indonesia on May 26, 1978 (English)*. Bank News Release; no. 1978-99. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099842008042216144>.
- World Bank. (1978c). *Announcement of World Bank Lends One Hundred Nine Million Dollars for Power Development in Indonesia on February 2, 1978 (English)*. Bank News Release; no. 1978-39. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099012007272222090>.
- World Bank. (1978d). *Announcement of World Bank Lends Seventy-Seven Million Dollars to Indonesia for Irrigation on December 22, 1978 (English)*. Bank News Release; no. 1979-37. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099932208162240526>.